

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Achmad, Yulianto dan Fajar Mukti, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bako, Ronny Sautma Hotma, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Daniri, Mas Achmad, 2006, *Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Ray Indonesia, Jakarta.
- Djojodirdjo, Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djokosantoso Moeljono, 2005, *Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance*, Elex Gramedia, Jakarta.
- Khairandy Ridwan, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kohar A, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Aumni, Bandung.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta.
- Latumenten, E, Pieter, 2011, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit dan Implikasi Hukumnya*, Tuma Press, Jakarta, 2011.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2003, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmadi, 2010, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljono, Djokosantoso, 2005, *Good Corporate Culture Sebagai Inti Dari Good Corporate Governance*, Elex Gramedia, Jakarta.
- Mohammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Notodisoerjo, Soegondo, 1993, *Hukum Notariat Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta.
- Saputro, Anke Dwi. Ed., 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu Sekarang dan Masa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Adjie, Habib, 2009, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sumarningsih, F. Eka, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris Diktat Kuliah Program Studi Notariat Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro*, Semarang.
- Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutojo, Siswanto, Aldridge, E. John, 2008, *Good Corporate Governance Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat Cetakan ke 2*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta.
- Thamrin, Husni, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Voeve Van, 1998, *Engelbrecht De Wetboeken wetten en Veroordeningen Benevens de Grondwet van de Republiek Indonesie*, Ichtiar Baru, Jakarta.

Zarkasyi, Wahyudin, 2008, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur Perbankan dan Jasa Keuangan Lainnya*, Alfabeta, Bandung.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan Atau Bangunan Berserta Perubahannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Ditjen AHU.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.HT.01.01 Tahun 2008 tentang Daftar Perseroan.

### 3. Jurnal/Makalah/Tesis

Wijayanti Mahera, “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Metode Pengadaan Barang dan Jasa di BUMN (Studi Kasus Pada Perusahaan BUMN PT. XYZ)”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015.

Umardani, “Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

### 4. Internet

Effendi, “Macam-Macam Status Sosial dan Stratifikasi Sosial di Masyarakat”, <http://organisasi.org>, diunduh pada tanggal 21 September 2016, pukul 22.25 WIB.

Faktor Penerapan Prinsip Good Corporate Governance, [www.madaniri.com](http://www.madaniri.com), diunduh pada tanggal 19 Agustus 2016, pukul 20.25 WIB.

Irma Devita, 2012, “Legalisasi Atau Waarmerking”, <http://irmadevita.com>, diunduh pada tanggal 23 September 2016, pukul 21.15 WIB.

Sahbani Agus, “Hak Ingkar Bukan Untuk Melindungi Notaris”, <http://www.hukumonline.com>, diunduh pada tanggal 23 September 2016, pukul 19.25. WIB.

Sulistiyani Diah, “Memahami Relevansi Notaris Dalam Supremasi Hukum, Pada Good Governance dan Good Corporate Governance (GCG)”, [www.medianotariat.com](http://www.medianotariat.com), diunduh pada tanggal 02 Oktober 2015, pukul 21.30 WIB.

\_\_\_\_\_, “Peranan Notaris dalam penegakan prudential banking guna turut menegakkan Good Governance dan Good Corporate Governance”, [www.medianotariat.com](http://www.medianotariat.com), diunduh pada tanggal 02 Oktober 2015, pukul 19.15 WIB.



Sofyan Syafran, "Good Corporate Governance dalam jabatan Notaris", <http://www.medianotariat.com>, diunduh pada tanggal 02 Oktober 2015, pukul 21.30 WIB.

Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip-prinsip OECD dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance, "Studi Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 Dalam Peraturan Bapepam Mengenai Corporate Governance", <http://www.bapepam.go.id>, diunduh pada tanggal 19 Agustus 2016, pukul 22.35 WIB.